

Proyeksi Diplomasi Kemanusiaan



Indonesia di Pasifik Selatan dalam Menyongsong
Indonesia Emas 2045



Tim Penulis :

Sri Patmi | Jonni Mahroza | Tasdik Mustika alam
Angkasa Dipua | Yurizki Aliyah | Muhammad Ilyansyah
Lukman Yudho Prakoso | Asep Iwa Soemantri | Ivan Yulivan

Editor :

Esa Dina Ina Rosyda



Proyeksi Diplomasi Kemanusiaan

Indonesia Di Pasifik Selatan Dalam Menyongsong
Indonesia Emas 2045

Tim Penulis:

Sri Patmi | Jonni Mahroza | Tasdik Mustika Alam
Angkasa Dipua | Yurizki Aliyah | Muhammad Ilyansyah
Lukman Yudho Prakoso | Asep Iwa Soemantri | Ivan Yulivan.



**PROYEKSI DIPLOMASI KEMANUSIAAN INDONESIA DI PASIFIK SELATAN
DALAM MENYONGSONG INDONESIA EMAS 2045**

Tim Penulis:

Sri Patmi, Jonni Mahroza, Tasdik Mustika Alam, Angkasa Dipua, Yurizki Aliyah,
Muhammad Ilyansyah, Lukman Yudho Prakoso, Asep Iwa Soemantri, Ivan Yulivan.

Desain Cover:

Esa Dina Ina Rosyida

Sumber Ilustrasi:

Esa Dina Ina Rosyida

Tata Letak:

Handarini Rohana

Editor:

Esa Dina Ina Rosyida

ISBN:

978-623-500-301-6

978-623-500-302-3 (PDF)

Cetakan Pertama:

Juli, 2024

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

by Penerbit Widina Media Utama

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

WIDINA MEDIA UTAMA

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020

Website: www.penerbitwidina.com

Instagram: [@penerbitwidina](https://www.instagram.com/penerbitwidina)

Telepon (022) 87355370

KATA PENGANTAR

Buku ini, berjudul "Proyeksi Diplomasi Kemanusiaan Indonesia di Pasifik Selatan dalam Menyongsong Indonesia Emas 2045," hadir sebagai panduan strategis bagi Indonesia dalam merumuskan dan mengimplementasikan diplomasi kemanusiaan di kawasan Pasifik Selatan. Menuju Indonesia Emas 2045, Indonesia memiliki peluang besar untuk memanfaatkan kekuatan diplomatiknya guna memimpin berbagai upaya kemanusiaan di wilayah tersebut.

Kami mengulas berbagai inisiatif strategis yang dapat dilakukan Indonesia, mulai dari peningkatan bantuan kemanusiaan dan pembangunan, kerja sama dalam mitigasi perubahan iklim, hingga penguatan diplomasi ekonomi. Selain itu, kami juga membahas pentingnya pendidikan dan pelatihan sebagai alat untuk meningkatkan kapasitas negara-negara Pasifik Selatan dalam menghadapi tantangan masa depan.

Diplomasi kemanusiaan merupakan pilar penting dalam visi Indonesia Emas 2045. Melalui pendekatan yang komprehensif dan koheren, Indonesia diharapkan dapat memainkan peran yang lebih aktif dalam mendukung stabilitas dan pembangunan di Pasifik Selatan. Buku ini juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah, LSM, dunia usaha, dan akademisi dalam mengoptimalkan potensi diplomasi kemanusiaan Indonesia.

Kami berharap buku ini dapat memberikan wawasan dan panduan praktis bagi para pembuat kebijakan, akademisi, serta pelaku diplomasi dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 melalui diplomasi kemanusiaan yang efektif dan berkelanjutan di Pasifik Selatan.

Selamat membaca!

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB 1 KONTEKSTUAL DIPLOMASI SECARA GLOBAL	1
A. Definisi Diplomasi	2
B. Konsep Diplomasi	6
C. Peran Diplomasi	7
D. Anatomi Diplomasi	8
E. Keterampilan dalam Diplomasi	9
F. Evolusi Diplomasi	10
G. Tantangan dan Tren Diplomasi	11
BAB 2 DIPLOMASI KEMANUSIAAN DAN PERDAMAIAN INDONESIA	13
A. Sejarah Diplomasi Kemanusiaan di Indonesia	15
B. Diplomasi Kemanusiaan dan Politik Luar Negeri Indonesia	20
C. Keterbatasan Pemerintah dan Munculnya Jalur Diplomasi Baru dalam Merespon Isu Kemanusiaan	28
D. Praktek Diplomasi Kemanusiaan	30
E. Diplomasi Kemanusiaan Negara Pasifik Selatan	33
BAB 3 KETERGANTUNGAN NEGARA PASIFIK SELATAN PADA NEGARA LAIN ..	37
A. Ketergantungan Negara Pasifik Selatan pada Negara Lain: Sebab, Dampak, dan Perspektif Masa Depan	37
1. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Ketergantungan Negara Pasifik Selatan pada Negara-Negara Lain	38
2. Dampak Ketergantungan Negara Pasifik Selatan pada Negara-Negara Lain	43
3. Perspektif Masa Depan Ketergantungan Negara Pasifik Selatan pada Negara-Negara Lain	44
4. Negara-Negara di Pasifik Selatan yang Bergantung pada Negara Lain	46
a. <i>Papua New Guinea</i>	46
b. Nauru	49
c. Marshall Islands	51
d. Kiribati	54
BAB 4 PASIFIK SELATAN DALAM PERANGKAP THUCYDIDES	57
A. Eksistensi China di Pasifik Selatan	58
B. Eksistensi Amerika Serikat di Pasifik Selatan	63

C. Negara-Negara di Pasifik Selatan dalam Perangkap <i>Thucydides</i> : Hegemoni China dan Amerika Serikat.....	65
BAB 5 DIPLOMASI KEMANUSIAAN DAN PERDAMAIAN INDONESIA.....	69
A. Hubungan Indonesia dan Negara-Negara di Pasifik Selatan	69
B. Hambatan Kerjasama antara Indonesia dengan Kawasan Pasifik Selatan.....	74
C. Analisis Diplomasi AS vs China.....	75
D. Proyeksi Diplomasi antara Indonesia dengan Kawasan Pasifik Selatan	78
E. Analisa Diplomasi Indonesia dengan Pendekatan Ekonomi dan Pertahanan	91
F. Diplomasi Kemanusiaan Indonesia Menyongsong Indonesia Emas 2045	100
G. Strategi Diplomasi Kemanusiaan Indonesia di Pasifik Selatan Menyongsong Indonesia Emas 2045.....	105
DAFTAR PUSTAKA	114

BAB 1

KONTEKSTUAL

DIPLOMASI SECARA GLOBAL

Sebelum mengupas lebih dalam tentang diplomasi kemanusiaan dan perdamaian yang dilakukan Indonesia di negara Pasifik Selatan dalam menghadapi *thucydides trap*, penulis terlebih dahulu akan memberikan gambaran yang umum dan integral mengenai kontekstual diplomasi secara mondial. Diplomasi yang kuat merupakan kebutuhan yang mendasar bagi setiap negara dalam menghadapi dinamika kompleks di tingkat internasional. Pertama, diplomasi yang efektif memungkinkan negara untuk memperjuangkan kepentingan nasionalnya dengan cara yang lebih diplomatis dan damai. Melalui diplomasi, negara dapat mencapai tujuan-tujuan strategis seperti perdamaian, keamanan, akses pasar global, dan perlindungan terhadap kepentingan ekonomi serta politiknya di tingkat internasional. Tanpa diplomasi yang kuat, negara rentan terhadap konflik dan pertentangan yang dapat mengancam stabilitas nasional dan regional.

Kedua, diplomasi yang kuat memungkinkan negara untuk membangun hubungan yang baik dengan negara lain, baik secara bilateral maupun multilateral. Hal ini penting untuk mempromosikan kerja sama internasional dalam berbagai bidang seperti perdagangan, keamanan, lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Melalui diplomasi yang aktif, negara dapat membangun kemitraan yang saling menguntungkan, menjaga stabilitas regional, dan menghadapi tantangan global bersama-sama.

Ketiga, diplomasi yang kuat juga memainkan peran penting dalam mencegah konflik dan mempromosikan perdamaian. Dengan menggunakan saluran diplomasi, negara-negara dapat melakukan dialog, negosiasi, dan mediasi untuk menyelesaikan perselisihan tanpa harus menggunakan kekuatan militer. Diplomasi yang efektif juga memungkinkan negara untuk membangun mekanisme kerja sama internasional seperti forum-forum regional dan organisasi internasional, yang dapat menjadi platform untuk mencari solusi atas masalah-masalah kompleks yang dihadapi oleh komunitas internasional secara bersama-sama. Dengan demikian, diplomasi yang kuat sangat penting untuk mempromosikan perdamaian, keamanan, dan kepentingan nasional di tingkat global.

BAB 2

DIPLOMASI KEMANUSIAAN DAN PERDAMAIAN INDONESIA

Diplomasi kemanusiaan merupakan upaya untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia, mengurangi penderitaan manusia, dan membangun perdamaian dan keamanan yang berkelanjutan di tingkat global. Diplomasi ini melibatkan negara-negara, organisasi internasional, dan berbagai aktor *non*-negara lainnya yang bekerja sama dalam mengatasi isu-isu kemanusiaan dan memperjuangkan keadilan sosial. Prinsip utama diplomasi kemanusiaan adalah menghormati dan melindungi martabat manusia, keadilan, solidaritas, dan kesetaraan. Diplomasi ini berfokus pada upaya melindungi orang-orang yang mengalami kesulitan, seperti korban konflik, pengungsi, dan kelompok rentan lainnya, serta mempromosikan penyelesaian damai konflik dan upaya rekonstruksi pasca-konflik.

Tujuan diplomasi kemanusiaan mencakup peningkatan akses terhadap bantuan kemanusiaan, upaya peningkatan pencegahan konflik, negosiasi dan mediasi untuk mencapai perdamaian, perlindungan hak asasi manusia, rehabilitasi sosial dan ekonomi pasca-konflik, serta membangun kapasitas masyarakat lokal dan pemerintah dalam menghadapi dan mengurangi dampak krisis. Dalam melaksanakan diplomasi kemanusiaan, negara-negara dan organisasi internasional dapat melakukan berbagai langkah, seperti mengirim misi kemanusiaan, menyediakan bantuan kemanusiaan, memfasilitasi dialog antara pihak yang terlibat dalam konflik, membangun kepercayaan, menyusun perjanjian dan kerangka hukum internasional untuk melindungi hak asasi manusia, serta membantu dalam rekonstruksi dan pembangunan pasca-konflik.

Diplomasi kemanusiaan tidak hanya berperan dalam merespons krisis, tetapi juga dalam mencegah terjadinya krisis dan konflik. Dengan bekerja sama dalam diplomasi kemanusiaan, negara-negara dan organisasi internasional dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman, adil, dan manusiawi di tingkat global. Dalam konteks dinamika perkembangan lingkungan strategis global, diplomasi kemanusiaan menjadi semakin relevan. Konflik bersifat kompleks dan meluas di berbagai negara dan wilayah, seperti di Timur Tengah, Rusia, Ukraina, Palestina, Israel, Afghanistan, dan Afrika. Situasi ini menciptakan penderitaan manusia yang besar, termasuk *displace*, kekurangan akses terhadap air, makanan, dan pelayanan kesehatan, serta

BAB 3

KETERGANTUNGAN NEGARA PASIFIK SELATAN PADA NEGARA LAIN

Pada bab sebelumnya, penulis telah memaparkan tentang daya tarik negara Pasifik Selatan. Penulis memiliki alasan kuat untuk menulis tentang Pasifik Selatan karena wilayah ini memiliki daya tarik strategis yang penting secara geopolitik dan ekonomi. Pertama-tama, Pasifik Selatan dikenal sebagai jalur perdagangan utama yang menghubungkan Asia, Amerika, dan Australia. Wilayah ini merupakan lalu lintas maritim vital bagi perdagangan internasional, terutama dalam hal pengiriman barang dan sumber daya alam. Oleh karena itu, keamanan dan stabilitas di Pasifik Selatan sangat diperlukan untuk kelancaran aktivitas ekonomi global.

Kedua, keberadaan sumber daya alam yang melimpah di Pasifik Selatan, seperti perikanan, mineral, dan energi, membuat wilayah ini menjadi incaran banyak negara. Kontrol atas sumber daya ini memberi kekuatan besar dalam hal ekonomi dan keamanan. Negara-negara di sekitar Pasifik Selatan, termasuk Indonesia, memiliki kepentingan strategis untuk memastikan pengelolaan yang berkelanjutan dan adil terhadap sumber daya ini, sekaligus melindungi kedaulatan wilayah mereka. Namun, dengan segala daya tarik tersebut negara Pasifik Selatan masih bergantung pada negara lain.

Dalam konteks diplomasi, Indonesia aktif terlibat dalam upaya untuk mempromosikan kerjasama regional dan keamanan di Pasifik Selatan. Melalui inisiatif seperti Forum Kepulauan Pasifik (*Pacific Islands Forum*) dan kerjasama bilateral dengan negara-negara di wilayah tersebut, Indonesia berupaya membangun hubungan yang kuat dan saling menguntungkan. Diplomasi Indonesia di Pasifik Selatan juga mencakup bidang-bidang seperti pembangunan ekonomi, pertukaran budaya, dan penanganan isu-isu keamanan bersama, yang semuanya merupakan upaya untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain kunci dalam dinamika regional Pasifik Selatan.

A. KETERGANTUNGAN NEGARA PASIFIK SELATAN PADA NEGARA LAIN: SEBAB, DAMPAK, DAN PERSPEKTIF MASA DEPAN

Negara-negara di Pasifik Selatan terdiri dari 14 negara, yaitu Australia, Selandia Baru, Papua Nugini, Fiji, Samoa, Vanuatu, Kepulauan Solomon, Tonga, Kiribati, Tuvalu, Palau, Nauru, Marshall Islands, dan Federasi

BAB 4

PASIFIK SELATAN

DALAM PERANGKAP *THUCYDIDES*

Seiring berjalannya waktu, kawasan Pasifik Selatan telah menjadi medan baru bagi persaingan geopolitik yang intens antara Amerika Serikat dan China. Dinamika ini sering kali dianalisis melalui prisma "Perangkap *Thucydides*," konsep yang diperkenalkan oleh sejarawan Yunani kuno, *Thucydides*, untuk menggambarkan ketegangan yang tak terhindarkan ketika kekuatan yang sedang naik daun menantang kekuatan yang telah mapan. Dalam konteks kontemporer, fenomena ini tampak nyata dalam cara kedua negara adidaya ini memperluas pengaruhnya di Pasifik Selatan melalui berbagai bentuk diplomasi dan bantuan.

Amerika Serikat, sebagai kekuatan yang telah lama dominan di kawasan Asia-Pasifik, berupaya mempertahankan posisinya dengan memperkuat hubungan militer dan ekonomi dengan negara-negara kepulauan Pasifik. Melalui berbagai program bantuan dan inisiatif diplomatik, Washington berusaha menggarisbawahi komitmennya terhadap stabilitas dan pembangunan regional. Program seperti *South Pacific Tuna Treaty* dan *Pacific Pledge* menjadi contoh konkret dari upaya Amerika Serikat untuk tetap relevan dan berpengaruh di kawasan tersebut. *South Pacific Tuna Treaty*, misalnya, tidak hanya memperkuat hubungan ekonomi tetapi juga memastikan akses berkelanjutan bagi armada penangkapan ikan AS di perairan Pasifik.

Di sisi lain, China terus memperluas jangkauan ekonominya melalui kebijakan "*Belt and Road Initiative*" yang ambisius. Negara Tirai Bambu ini tidak hanya menawarkan bantuan pembangunan infrastruktur, tetapi juga mempromosikan investasi langsung dan perdagangan yang lebih erat dengan negara-negara di Pasifik Selatan. Strategi ini bertujuan untuk mengukuhkan hubungan bilateral yang lebih kuat dan memperluas pengaruh politik Beijing di kawasan tersebut. Sebagai contoh, investasi China di bidang infrastruktur di Vanuatu dan Fiji telah meningkatkan ketergantungan ekonomi negara-negara tersebut terhadap China, sekaligus memperkuat posisi strategis Beijing di wilayah ini.

Perlombaan diplomasi dan bantuan ini memicu berbagai dinamika baru dalam politik regional. Negara-negara kepulauan Pasifik, yang sebelumnya sering terabaikan dalam percaturan politik global, kini menemukan diri

BAB 5

DIPLOMASI KEMANUSIAAN DAN PERDAMAIAN INDONESIA

Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang luas dan kaya akan keanekaragaman yang dimilikinya. Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar dengan jumlah pulau sebanyak 17.491 yang terdiri dari 34 Provinsi. Terdapat kurang lebih 1.340 suku bangsa yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta Indonesia menjadi negara urutan kedua dengan bahasa daerah terbanyak setelah Papua Nugini. Indonesia berbatasan langsung dengan dua Samudera besar yakni Samudera Pasifik dan Samudera Hindia dan berbatasan dengan Benua Asia dan juga Australia. Pada pembahasan kali ini akan berfokus pada kerjasama antara Indonesia dan juga negara-negara yang ada di Pasifik Selatan serta proyeksi diplomasi yang harus dilakukan Indonesia di Negara-Negara Pasifik Selatan.

A. HUBUNGAN INDONESIA DAN NEGARA-NEGARA DI PASIFIK SELATAN

Pasifik Selatan merupakan gugusan-gugusan kepulauan yang terdiri dari berbagai negara kecil yang ada di selatan Samudera Pasifik. Kawasan-kawasan ini dijuluki sebagai *Pacific Rim* (Baskom Pasifik). Gugusan pulau-pulau ini berada di sebelah timur Indonesia lebih tepatnya dekat dengan Pulau Papua dan negara Papua Nugini. Istilah Pasifik Selatan digunakan pada *South Pacific Forum* (SPF) yang diadakan pada tahun 1971 yang terdiri dari 16 negara yaitu Australia, Selandia Baru Cook Island, Fiji, Karibiati, Marshall Island Nauru, Niue, Tokelau, Palau, Papua Nugini, Samoa, Solomon Island, Tonga, Tuvalu, Timor Leste dan negara-negara teritori milik Amerika Serikat (Anshari G. 2016). Masyarakatnya pun memiliki karakteristik yang hampir mirip dengan orang-orang Indonesia karena berasal dari ras yang sama yakni Melanesia, selain itu kawasan ini didiami oleh ras suku Polinesia dan juga Mikronesia. Masing-masing suku ras tersebut mendiami tempat-tempat yang ada di kawasan Pasifik Selatan itu sendiri.

Pada tahun 2005, Pasifik Selatan memperoleh devisa mencapai USD 1,5 Miliar (*Pacific Island Trade and Invest*, 2012). Penghasilan yang didapatkan tidak jauh berbeda dengan Indonesia yakni mengandalkan sektor perikanan, perkebunan kelapa, pariwisata dan kerajinan tangan (Anshari G. 2016). Namun kekurangan Sumber Daya Manusia menyebabkan potensi-potensi

DAFTAR PUSTAKA

- Adler, E. (1997). Seizing the Middle Ground: Constructivism in World Politics. *European Journal of International Relations*, 3(3), 319–363.
- Allen, M. J., & Edmonds, P. (2015). Australian and New Zealand Development Assistance to Asia and the Pacific: towards closer coordination. *Asia & the Pacific Policy Studies*.
- Asian Development Bank. (2017). *Pacific Approach, 2016–2020: Geared for Success*.
- Asian Development Bank. (2020). *Pacific Economic Monitor 2020: Harnessing Tourism for Inclusive Growth*
- Bappenas. (2020). *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045*. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Barasa, L., & Njanja, L. (2018). Ketergantungan Ekonomi Negara-negara Pulau Pasifik. *Jurnal Internasional untuk Komunitas Pembangunan Berkelanjutan*.
- Baylis, J., & Smith, S. (Eds.). (2018). *The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations (7th ed.)*. Oxford University Press.
- Baylis, J., Smith, S., & Owens, P. (Eds.). (2017). *The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations (7th ed.)*. Oxford University Press.
- Berridge, G. (2005). *Diplomacy: Theory and Practice*. Palgrave Macmillan.
- Berridge, G. R. (2015). *Diplomacy: Theory and Practice (5th ed.)*. Palgrave Macmillan.
- Berridge, G. R. (2015). *Diplomacy: Theory and Practice (5th ed.)*. Palgrave Macmillan.
- Berridge, G.R. *Diplomacy: Theory and Practice*. Palgrave Macmillan, 2015.
- Brady, A. (2015). China's Expanding Influence in the South Pacific. *Australian Journal of International Affairs*.
- Brady, A. M. (2008). *Looking North, Looking South: China, Taiwan, and the South Pacific*. World Scientific.
- Brant, P. (2013). "Chinese Aid in the Pacific." Lowy Institute for International Policy, link.
- Cooper, A. F., Heine, J., & Thakur, R. (Eds.). (2013). *The Oxford Handbook of Modern Diplomacy*. Oxford University Press.

- Cooper, A. F., Hocking, B., & Maley, W. (Eds.). (2016). *The Diplomacy of Small States: Between Vulnerability and Resilience*. Palgrave Macmillan.
- Cooper, Andrew F. *Diplomatic Afterlives*. Princeton University Press, 2019.
- Crocombe, R. (2007). *Asia in the Pacific Islands: Replacing the West*. IPS Publications, University of the South Pacific.
- Deitelhoff, N., & Löwenstein, S. (2017). *The New Tools of International Relations: Technology and Global Politics*. Cambridge University Press.
- Dornan, M., & Pryke, J. (2017). "Foreign Aid to the Pacific: Trends and Developments in the Twenty-First Century." *Asia & the Pacific Policy Studies*, 4(3), 386-404.
- Dugis, A. (2018). *Kebangkitan China di Pasifik Selatan*.
- Fawn, Rick, and J. P. Payne. *A History of Diplomacy*. Routledge, 2018.
- Fifita, M., & Hanson, F. (2011). "China in the Pacific: The New Banker in Town." Lowy Institute for International Policy.
- Fisher, R., Ury, W., & Patton, B. (2011). *Getting to Yes: Negotiating Agreement Without Giving In*. Penguin Books.
- Fraenkel, J. T. (2015). The manipulation of custom: From uprising to governing in modern Fiji. *The Journal of Pacific History*.
- Gideon, R. S. (2020). *Diplomacy* (2nd ed.). Polity Press.
- Hamilton, K., & Langhorne, R. (Eds.). (1995). *The Practice of Diplomacy: Its Evolution, Theory and Administration*. Routledge.
- Hanson, F. (2008). "The Dragon Looks South." Lowy Institute for International Policy, link.
- Hayward-Jones, J. (2013). "Big enough for all of us: Geo-strategic competition in the Pacific Islands." Lowy Institute for International Policy.
- Hegarty, D. (2015). "Australia's Pacific engagement: The China factor." Australian Strategic Policy Institute
- Henderson, J., & Reilly, B. (2003). "Dragon in paradise: China's rising star in Oceania." *The National Interest*, 72, 94-104.
- Herr, R.A. (2010). "Small Island States of the Pacific and the Changing Nature of International Politics." *Commonwealth & Comparative Politics*, 48(2), 151-175.
- Holmes, A. R. (Ed.). (2017). *The Oxford Handbook of Diplomacy*. Oxford University Press.
- Hughes, H., & Reubi, D. (2016). *Geo-economics in the Pacific Islands: The evolving balance of aid, trade and investment*. *The Journal of Pacific Studies*.
- Jönsson, C., & Hall, M. (Eds.). (2018). *Essence of Diplomacy*. Palgrave Macmillan.

- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2023). "Diplomasi Ekonomi Indonesia." Retrieved from Kemlu.go.id
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2023). "Diplomasi Pertahanan Indonesia." Retrieved from Kemhan.go.id
- Keohane, R. O., & Nye, J. S. (2001). *Power and Interdependence: World Politics in Transition*. Pearson.
- Kissinger, H. (2014). *Diplomacy*. Simon & Schuster.
- Kissinger, Henry. *Diplomacy*. Simon & Schuster, 1994.
- Kompas. (2022). Pasifik Selatan Menjadi Arena Rebutan Pengaruh.
- Kukutai, T. (2015). Indigenous tourism in the Pacific Islands: Development, shadows and challenges. *Pacific Asia Inquiry*.
- Lum, T., & Vaughn, B. (2007). "The Southwest Pacific: U.S. Interests and China's Growing Influence." Congressional Research Service Report for Congress.
- McDonnell, S. (2014). *Australia's Foreign Aid Dilemma: Humanitarian Aspirations Confront Democratic Legitimacy*. Routledge.
- Melissen, J. (Ed.). (2017). *The New Public Diplomacy: Soft Power in International Relations (Second Edition)*. Palgrave Macmillan.
- Melissen, Jan. *The New Public Diplomacy: Soft Power in International Relations*. Palgrave Macmillan, 2007.
- Ministry of Tourism, Ministry of Sustainable Development, the Environment and Climate Change, and the Gozo Tourism Association (2019). *Gozo Tourism Strategy for 2025 – A Sustainable Tomorrow*.
- Moertopo, A. (1982). *Strategi Pembangunan Nasional*.
- Morrison, J. (2017). Current resource trends in Pacific Island states. *Resource Policy*.
- Nugroho, Joko. (2022). "Proyeksi Diplomasi Kemanusiaan Indonesia di Pasifik Selatan dalam Menyongsong Indonesia Emas 2045." Jakarta: Gramedia.
- O'Meara, D., & Horbury, J. (2017). The Secret Elephant in the Room: Regionalism and the Pacific Islands Forum. *Australian Journal of International Affairs*.
- Robie, D. (2005). Pacific media systems and political independence. In *Media and democracy in Asia* (pp. 51-73). Routledge.
- Shie, T. R. (2007). "Rising China: US-Japan responses and the South China Sea security dilemma." *Cambridge Review of International Affairs*, 20(3), 307-326.
- Shie, T. R. (2018). *Kebangkitan Tiongkok di Pasifik Selatan*.
- Stewart, F. (2016). *Foreign Aid as Foreign Policy: The case of New Zealand aid in the Pacific*. Commonwealth & Comparative Politics.

- Sukma, Rizal. (2019). "Indonesia and the Emerging Indo-Pacific Region: Opportunities and Challenges." *Journal of International Relations*, 21(1), 10-25.
- Suter, K. D. (1982). *Australia dan Kawasan Pasifik Selatan*.
- Teaiwa, T. (2007). "Pacific genealogies and the ocean" being and becoming" Pacific people in 'A Small Place'. *Intersections: Gender and Sexuality in Asia and the Pacific*.
- United Nations Development Program. (2018). *Economic Diversification for Sustainable Human Development in Small Island Developing States (SIDS)*.
- Vukadinovic, R. (2016). *Communication Skills in Diplomacy*. *The Annals of the University of Oradea, Economic Sciences Series*, 25(1), 808–813.
- Wallis, J. (2012). "The South Pacific: 'arc of instability' or 'arc of opportunity'?" *Global Change, Peace & Security*, 24(1), 59-70.
- Wati, E. (2018). *Dampak Perubahan Iklim di Pasifik Selatan*.
- Wesley-Smith, T. (2007). *China in Oceania: New Forces in Pacific Politics*. East-West Center.
- Wesley-Smith, T. (2013). "China's Rise in Oceania: Issues and Perspectives." *Pacific Affairs*, 86(2), 351-372.
- Willmott, W. (2007). *The Chinese Communities in the Smaller Countries of the South Pacific: Kiribati, Nauru, Tonga, Cook Islands*. In *The Chinese Diaspora: Space, Place, Mobility, and Identity*.
- Windybank, S. (2005). "The China Syndrome." *Policy*, 21(2), 28-33.
- Windybank, S. (2008). "Pacific Aid Effectiveness and Donor Coordination: Working Together or in Competition?" *Pacific Economic Bulletin*, 23(1), 147-161.
- World Bank. (2019). *Pacific Possible: Long-Term Prospects for Pacific Island Countries*.
- Yang, J. (2009). "China in the South Pacific: Hegemon on the Horizon?" *The Pacific Review*, 22(2), 139-158.
- Zhang, D. (2015). *Kepentingan Tiongkok di Wilayah Pasifik*.
- Zhang, Y. (2015). "China's Relations with the Pacific Islands." In Zhang, Y. & Austin, G. (Eds.), *Power and Responsibility in Chinese Foreign Policy* (pp. 237-256). ANU Press.

Indonesia Emas 2045 adalah visi yang memerlukan pendekatan strategis dalam berbagai aspek, termasuk diplomasi kemanusiaan. Buku ini, "Proyeksi Diplomasi Kemanusiaan Indonesia di Pasifik Selatan dalam Menyongsong Indonesia Emas 2045," mengeksplorasi bagaimana Indonesia dapat memanfaatkan kekuatan diplomatiknya untuk memimpin upaya kemanusiaan di Pasifik Selatan, sebuah kawasan yang memegang potensi besar untuk kemitraan strategis.

Di tengah tantangan global, Indonesia dapat meningkatkan bantuan kemanusiaan dan pembangunan untuk negara-negara di Pasifik Selatan. Melalui donasi vaksin, dukungan kesehatan, dan bantuan penanggulangan bencana, Indonesia dapat menunjukkan solidaritas dan kerja sama dalam menghadapi krisis kesehatan, bencana alam, dan kelaparan. Buku ini menggambarkan bagaimana Indonesia dapat membantu negara-negara tersebut mengatasi tantangan mendesak dan meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya.

Terlebih lagi, negara-negara Pasifik Selatan sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Indonesia dapat memimpin upaya regional untuk mitigasi perubahan iklim dengan mengurangi emisi karbon, melindungi ekosistem laut dan pesisir, serta mempromosikan energi terbarukan. Melalui kerja sama multilateral dan bilateral, Indonesia dapat membantu negara-negara ini mengembangkan kebijakan dan program yang berkelanjutan, menjadikan kawasan Pasifik Selatan lebih tahan terhadap perubahan iklim.

Diplomasi ekonomi adalah alat penting untuk memperkuat hubungan Indonesia dengan negara-negara Pasifik Selatan. Investasi dalam infrastruktur, perdagangan, dan teknologi dapat mendorong pembangunan ekonomi di kawasan ini. Dengan membangun hubungan ekonomi yang kuat, Indonesia tidak hanya mendukung pembangunan tetapi juga memperkuat stabilitas regional. Buku ini memberikan pandangan mendalam tentang bagaimana diplomasi ekonomi dapat menjadi pilar utama dalam strategi diplomasi kemanusiaan Indonesia.

Selain itu, Pendidikan dan pelatihan adalah komponen kunci dalam membangun kapasitas negara-negara Pasifik Selatan. Indonesia dapat menawarkan program beasiswa, pelatihan tenaga kerja, dan pertukaran pengetahuan dalam berbagai bidang, seperti kesehatan, teknologi, dan manajemen bencana. Melalui inisiatif ini, Indonesia dapat membantu negara-negara Pasifik Selatan mempersiapkan diri menghadapi tantangan masa depan dengan lebih baik.

Untuk memfasilitasi kerja sama yang lebih erat dalam isu-isu kemanusiaan, Indonesia perlu memperluas jaringan diplomatiknya di Pasifik Selatan. Dengan membuka lebih banyak kedutaan besar, konsulat, dan misi permanen, Indonesia dapat memperkuat kehadiran diplomatiknya dan meningkatkan pengaruhnya di kawasan tersebut. Buku ini menguraikan strategi yang dapat diambil untuk memperkuat jaringan diplomatik dan mendukung misi kemanusiaan.

Menggabungkan analisis data peramalan statistik dan faktor-faktor eksternal, buku ini menyusun strategi diplomasi yang komprehensif dan kohesif. Dengan fokus pada penguatan hubungan ekonomi, pertahanan, dan budaya, serta memanfaatkan potensi dari sumber daya alam, geografi, dan populasi Indonesia, strategi ini dirancang untuk mencapai tujuan nasional dalam visi Indonesia Emas 2045.

"Proyeksi Diplomasi Kemanusiaan Indonesia di Pasifik Selatan dalam Menyongsong Indonesia Emas 2045" adalah panduan strategis yang komprehensif untuk memahami dan merumuskan diplomasi kemanusiaan Indonesia. Buku ini mengajak pembaca untuk melihat peran Indonesia di panggung global dan bagaimana kita dapat mencapai visi Indonesia Emas 2045 melalui diplomasi yang berkelanjutan dan efektif. Melalui kerangka diplomasi yang tangguh, Indonesia dapat memainkan peran aktif dalam mendukung stabilitas dan pembangunan di Pasifik Selatan, menjadikan kawasan ini sebagai mitra strategis dalam mencapai tujuan nasional.